



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan piutang pajak diperlukan upaya penagihan pajak, diantaranya dengan cara memberikan pemberian pengurangan dan pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib

Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB-P2.
9. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. *SMARTGOV* adalah sistem administrasi Pajak yang digunakan untuk mencatat seluruh data Perpajakan

Daerah.

BAB II
PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati secara jabatan memberikan pengurangan dan pembebasan pokok PBB-P2.

Bagian Kedua
Pembebasan

Pasal 3

- (1) Pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhadap PBB-P2 sampai dengan tahun Pajak 2018.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melunasi 50% pokok Pajak PBB-P2 tahun Pajak 2019;
 - b. melunasi pokok masa Pajak tahun 2020 sampai dengan masa Pajak tahun 2024; dan
 - c. melunasi denda Pajak untuk PBB-P2 masa Pajak tahun 2022 sampai dengan masa Pajak tahun 2024.
- (3) Pelunasan pokok dan denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.

- (4) Pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis melalui *SMARTGOV* pada saat Wajib Pajak melakukan pelunasan pokok dan denda Pajak untuk PBB-P2 masa Pajak tahun 2020 sampai dengan masa Pajak tahun 2024.

Bagian Ketiga Pengurangan

Pasal 4

- (1) Pengurangan pokok PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhadap pokok PBB-P2 terutang tahun Pajak 2019.
- (2) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB-P2 terutang.
- (3) Untuk mendapatkan pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak memenuhi persyaratan tidak memiliki tunggakan utang Pajak selain utang PBB-P2 pada tahun Pajak 2019.
- (4) Pelunasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.
- (5) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis melalui *SMARTGOV*.

Bagian Keempat
Pembayaran

Pasal 5

Pelunasan pokok dan denda Pajak untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibayarkan oleh Wajib Pajak secara tunai atau non tunai pada rekening bank kas Daerah.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran dan/atau penundaan kewajiban pembayaran PBB-P2 sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tidak diberikan pengurangan dan/atau pembebasan pokok PBB-P2.

Pasal 7

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan dan/atau pembebasan pokok PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Agustus 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001